

STEERING COMMITTEE
CIVIL SOCIETY ORGANIZATION
OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP INDONESIA

Jakarta, 3 November 2020

Kepada Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia
Di
Jakarta

**Perihal: Pernyataan Sikap Resmi Organisasi Masyarakat Sipil OGI
atas Penandatanganan RUU Cipta Kerja**

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami mewakili Steering Committee Civil Society Organization on Open Government Partnership (SC-CSO OGP) di Indonesia ingin menyampaikan sikap kami atas disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pernyataan ini kami buat dengan berlandaskan kepada keaktifan dan keikutsertaan Indonesia sebagai inisiator Open Government Partnership, sebuah inisiatif demokratis berpengaruh yang saat ini beranggotakan 79 negara di tingkat internasional yang memiliki keyakinan atas pemerintahan yang terbuka berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inovasi.

Kami sangat menyayangkan atas proses pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja yang tergesa-gesa, minim transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga menuai berbagai protes dan keberatan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama yang terjadi sepanjang bulan Oktober 2020. Proses pembahasan RUU ini terus dilakukan di tengah situasi pandemi yang sedang menjadi perhatian dan keprihatinan utama dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Akibatnya pembahasan RUU Cipta Kerja yang disiarkan oleh DPR menjadi tidak bermakna karena ruang partisipasi masyarakat terbatas dan masyarakat terdampak sulit mengawasi substansi RUU Cipta Kerja.

Demikian halnya ketika UU ini telah diundangkan pada 3 November 2020, masih ditemui banyak kesalahan teknis dan kekeliruan dalam penulisan pasal maupun susunan dan acuannya. UU Cipta Kerja telah diberikan nomor resmi, hanya saja masih terdapat banyak salah pengetikan dan sempat diturunkan dari website Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Pasifik, negara Anggota Open Parliament, dan menjadi Steering Committee Open Government Partnership untuk ketiga kalinya, Indonesia seharusnya dapat menjadi pionir dan teladan dalam mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintah yang baik. Karena proses penyusunan dan substansi UU Cipta Kerja mengabaikan nilai-nilai Open Government Partnership tersebut, kami menyarankan Bapak Presiden dapat mencabut UU Cipta Kerja dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) dan membentuk UU Cipta Kerja yang fokus untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-undangan tanpa meninggalkan prinsip perlindungan lingkungan, HAM dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, tujuan utama dari undang-undang tersebut yaitu untuk meningkatkan

infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

MediaLink
Enhancing Community's Power
Through Information

**INDONESIAN
PARLIAMENTARY
CENTER**

**Member of
actionaid**
YAPPIKA

**Publish
What You Pay
INDONESIA**

Perludem
PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI

**SEKNAS
FITRA**

**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
Indonesia
the global coalition against corruption

ICW
INDONESIA CORRUPTION WATCH

PATTIRO
PERAT TELAH DAN
INDONESIA REGIONAL

ICEL

kesejahteraan masyarakat dan melakukan transformasi ekonomi, sesuai dengan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.

Jika Bapak Presiden tetap memberlakukan UU Cipta Kerja ini, kami mohon proses yang terbuka dan seadil-adilnya baik pada saat pembuatan Peraturan Pemerintah maupun pada saat berjalannya proses gugatan warga negara di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan standar pemerintahan terbuka. Keprihatinan ini kami harapkan dapat menjadi catatan bagi proses legislasi sejenis di kemudian hari agar tidak terulang kembali. Kami sangat berharap kepada Bapak Presiden untuk menghormati hak warga dan tidak ada lagi kekerasan kepada masyarakat sipil yang menolak UU Cipta Kerja ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan mempertimbangkan kepentingan nasional seluruh rakyat Indonesia dan juga kredibilitas Indonesia terutama di lingkup negara-negara demokrasi di dunia, khususnya di kalangan negara-negara anggota Open Government Partnership. Atas perhatiannya dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Steering Committee CSO – Open Government Partnership Indonesia

Ttd.	Ttd.	Ttd.
Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif Medialink	Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID	Bejo Untung, Direktur Eksekutif PATTIRO
Ttd.	Ttd.	Ttd.
Ahkmad Misbahkul Hasan Sekretaris Jenderal Seknas FITRA	Aryanto Nugroho Direktur Eksekutif PWYP Indonesia	Adnan Topan Husodo Koordinator ICW
Ttd.	Ttd.	Ttd.
Ahmad Hanafi Direktur Eksekutif IPC	Khoirunnisa N. Agustyati Direktur Eksekutif Perludem	Fransisca Fitri Direktur Eksekutif YAPPIKA - Action Aid
Ttd.	Ttd.	Ttd.
Reynaldo Sembiring Direktur Eksekutif ICEL	Danang Widjoko Sekretariat Jenderal Transparency Internatiol Indonesia	Darwanto Kepala Sekretariat SC CSO - OGP Indonesia

infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

MediaLink
Enhancing Community's Power
Through Information

**INDONESIAN
PARLIAMENTARY
CENTER**

Member of
actionaid
YAPPIKA

Publish 
What You Pay
INDONESIA


Perludem
PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI

**SEKNAS
FITRA**

 **TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
Indonesia
the global coalition against corruption


ICW
INDONESIA CORRUPTION WATCH

 **PATTIRO**
PRATYELAH DAN
INFORMASI REGIONAL


ICEL

Sekretariat :
Jalan Tebet Timur Dalam
8 V No. 21 Tebet, Jaksel
021 8303131
www.medialink.or.id/
sekretariat-co-ogp/